

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renstra (Rencana Strategis) merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan lingkup tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 Kabupaten Kampar serta program dan kegiatan Lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar selama 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan serta

faktor–faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis denganmengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapatdicapai, yang penyusunannya berpedoman pada RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kampar periode 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022.

Review RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi,urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunandaerah dalam lima tahun kedepan. Untuk itu perlu dilakukan Pertemuan dengan Stakeholder yang relevan.

Bentuk hubungan (keterkaitan) antara Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.1.1. Hubungan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar dengan RPJMD Kabupaten Kampar

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menyiapkan Rancangan Awal Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 sesuai dengantugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kampar;
- b. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kampar termasuk Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menjadi input bagi Bappeda Kabupaten Kampar untuk memutakhirkan rancangan RPJMD Kabupaten Kampar.
- c. Rancangan RPJMD Kabupaten Kampar dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) JangkaMenengah Kabupaten Kampar;

- d. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten Kampar digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kampar;
- e. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kampar digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dalam pematkhiran Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar;
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kampar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kampar maka Perangkat Daerah Kabupaten Kampar menetapkan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi Renstra Perangkat Daerah, dimana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar juga menetapkan Peraturan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tentang Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022.
- g. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

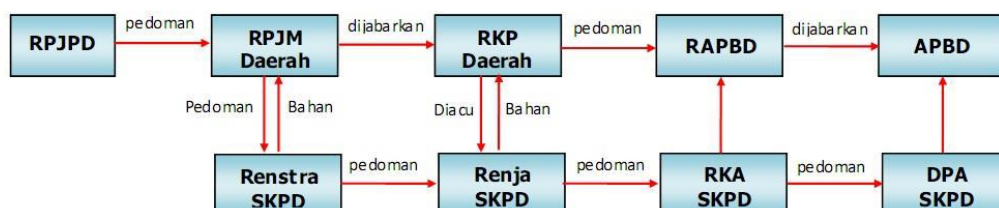
1.1.2. Hubungan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Kampar dengan Renja Kantor Kesbangpol

- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar dan mengacu pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar melalui Forum Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar;

- b. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar termasuk Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menjadi input bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Kampar.
- c. Rancangan RKPD Kabupaten Kampar dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar;
- d. Hasil Musrenbang Kabupaten Kampar digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kampar;
- e. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kampar digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dalam pematkhiran Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Kampar;
- f. Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kampar ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kampar maka Perangkat Daerah Kabupaten Kampar menetapkan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, dimana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar juga menetapkan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar.

Hubungan antara Renstra Kantor Kesbangpol Kab.Kampar Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya di tunjukkan oleh gambar dibawah ini :

Gambar 1.1



1.1.3. Hubungan Renstra Kantor Kesbangpol Kab.Kampar Dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Penekanan pembangunan lima tahun mendatang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017-2022 untuk lebih memperhatikan agenda pembangunan Nawacita yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menjelaskan visi pembangunan: “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, dan Misi Pembangunan: (1) Mewujudkan Keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan Masyarakat Maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

RPJMN 2015-2019 memuat sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu : (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran negara

dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar Internasional sebagai bangsa Indonesia bias maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kampar Tahun 2017-2022, Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011, Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Partai Politik;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2012, Tentang Penanganan konflik social;
6. Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;

9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan terhadap Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
12. Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 42 dan 40 tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 43 dan 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 39 Tahun 2007, Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 49 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda;
23. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Perubahan Permendagri nomor 44 tahun 2009 tentang Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permendagri nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pertanggungjawaban dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
 32. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik selama lima tahun kedepan;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perencanaan jangka menengah;
- c. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kampar yang transparan dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Tujuannya disusunnya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antarpelaku pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 ini terdiri dari 7 Bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD (KESBANGPOL)

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
- 2.2. Sumber Daya Pada SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
- 3.2. Telaahan, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Adapun susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar terdiri dari:

- a. Kepala Kantor.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Kesatuan Bangsa.
- d. Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik.
- e. Seksi Hak Asasi Manusia dan Hubungan Antar Lembaga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b. Menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan wawasan kebangsaan ;
- d. Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;

- e. Melakukan sosialisasi dan pemahaman dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila ;
- f. Melakukan sosialisasi dan pemahaman dalam pelaksanaan Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Bangsa ;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaporan ;
- h. Melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas nya ;

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur susunan organisasi akan dijabarkan di bawah ini.

1. KEPALA KANTOR

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik

2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam menyelenggarakan kegiatan umum, kepegawaian, perencanaan dan data serta keuangan dilingkungan kantor.

Adapun uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
- b. Melaksanakan administrasi umum, surat menyurat/kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- c. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang, surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya ;

- d. Melaksanakan urusan kepegawaian, kebersihan dan keamanan kantor ;
- e. Menyiapkan bahan-bahan laporan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor ;

3. SEKSI KESATUAN BANGSA

Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan diseksi kesatuan bangsa.

Adapun uraian tugas Seksi Kesatuan Bangsa sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan fasilitasi yang berhubungan dengan kesatuan bangsa ;
- b. Melaksanakan administrasi, laporan dan tatausaha diseksi kesatuan bangsa ;
- c. Mengumpulkan dan mensistimatiskan data dan mennyiapkan rencana/penetapan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pengawasan, wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai-nilai sejarah kebangsaan ;
- d. Merencanakan kegiatan/ melaksanakan pembinaan dan pengawasan kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, konflik sosial, pengawasan orang-orang asing dan lembag asing ;
- e. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perizinan dalam rangka penelitian ilmiah, pendirian ormas/LSM dan sebagainya ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala kantor sesuai dengan bidang tugasnya ;

4. SEKSI PEMBINAAN IDEOLOGI DAN POLITIK

Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pembinaan dan merumuskan Pembinaan Ideologi dan Politik, Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Pemilu.

Adapun uraian tugas Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pengenalan untuk mengembangkan peresapan ideologi pancasila, merencanakan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan ideologi negara ;
- b. Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dibidang ketahan seni, budaya, agama, kepercayaan pembauran dan aplutasi budaya, ormas serta penanganan masalah sosial masyarakat ;
- c. Menyiapkan dan membuat laporan serta merumuskan kebijkan politik dan pemeliharaan stabilitas politik dan demokrasi ;
- d. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pemilu ;
- e. Menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas-tugas dan laporan lainnya yang diberikan kepala kantor sesuai dengan bidang tugasnya ;

5. SEKSI HAK ASASI MANUSIA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

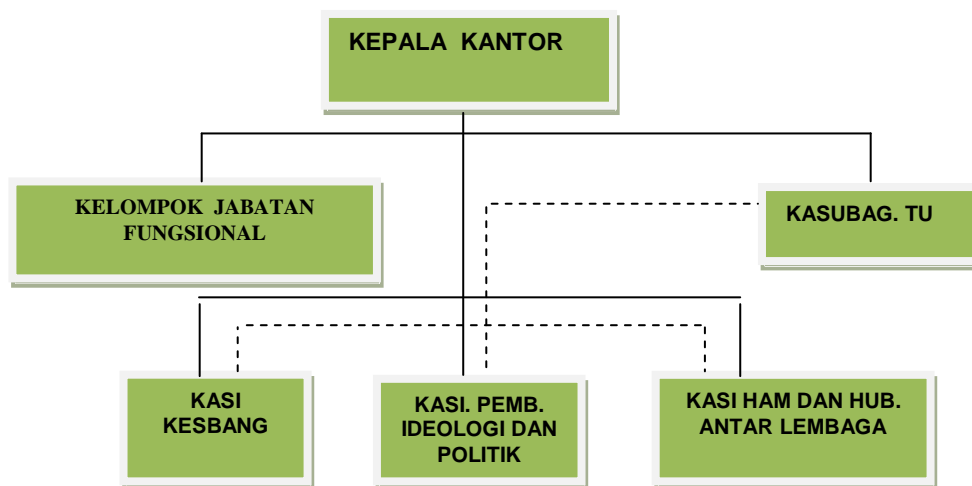
Seksi Hak Asasi Manusia dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan Hak Asasi Manusia dan Hubungan Antar Lembaga.

Adapun uraian tugas Seksi Hak Asasi Manusia dan Hubungan Antar Lembaga sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan dan laporan penegakan Hak Asasi Manusia ;
- b. Merencanakan kebijakan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penegakan Hak Asasi Manusia ;
- c. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan fasilitasi antar lembaga, serta pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan Partai Politik dan Ormas.
- d. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan kelembagaan sosial politik dan ormas ;
- e. Melaksanakan koordinasi bimbingan dan evaluasi ketahanan, perdagangan, pertahanan lembaga ekonomis dan ketahanan organisasi masyarakat ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala kantor sesuai dengan tugasnya ;

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kampar



Keterangan :

————— : Garis Instruktif
 : Garis Koordinatif

2.2. SUMBER DAYA PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. KONDISI UMUM PEGAWAI

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sebanyak 19 orang yang terdiri dari PNS, dan tenaga keamanan dan kebersihan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabelberikut :

Tabel2.1.
Jumlah Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kampar Tahun 2017

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)
1.	PNS	12
2.	PETUGAS KEBERSIHAN	1
3.	PETUGAS KEAMANAN	2
4	THL	5
	JUMLAH	20

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Fungsional Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupten Kampar Nomor 06 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 5 orang. Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 7 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel2.2.

Jumlah PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Tahun 2017

NO	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	4
3.	Fungsional Umum	7
	Jumlah	12

b. Jumlah PNS berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 12 jumlah Pegawai yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 16,7% pegawai yang berstatus golongan IV sedangkan golongan III sebanyak 50%, dan yang bersatatus golongan II yaitu 33,3%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel2.3.

Jumlah Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2017

NO	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	2
2.	III	6
3.	II	4
	Jumlah	12

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada, maka status pendidikan dengan lebih mendominasi Strata-1 sebesar 58,3% dan SLTA/SMK yaitu sebesar 41,7%,. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel2.4.
Jumlah Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata-2 (S2)	-
2.	Strata-1 (S1)	7
3.	SLTA/SMK	5
	Jumlah	12

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 7 orang pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah berpendidikan sarjana. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut. :

Tabel2.5
Jumlah Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Berdasarkan Kesarjanaan Tahun 2017

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
I	SARJANA	
	1. Pemerintahan	2
	2. Ekonomi	2

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
	3. Hukum	1
	4. Pertanian	1
	5. Pariwisata	1
	Jumlah	7

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Kantor kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kampar. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kampar semakin berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2017, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 12 pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 1 (satu) orang yang telah mengikuti Diklat PIM II, 2 (dua) orang yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebanyak 4 orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Jumlah Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengikuti Perjenjangan Tahun 2017

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)
1.	Sapamen/ Diklat PIM II	1
2.	Spama/Diklat PIM III	2
3.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	4
	Jumlah	7

2. KONDISI UMUM SARANA KERJA

Sarana kerja yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.7.
Sarana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Pilitik
sampai Dengan Tahun 2017

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	M2
2	GEDUNG	1	UNIT (1 LANTAI) M2
3	LISTRIK	1	JARINGAN
4	AIR	1	JARINGAN
5	TELPON	1	LINE 2 (1 FAX)
6	AREA PARKIR	1	AREA
7	RUANG RAPAT	1	RUANG
8	RUANG ARSIP	1	RUANG
9	MUSHOLLA	-	-
10	KENDARAAN RODA 4	1	UNIT
11	KENDARAAN RODA 2	-	UNIT
12	MEJA RAPAT	10	UNIT
13	KURSI RAPAT	21	UNIT
14	LEMARI BUKU DAN ARSIP	3	UNIT
15	AC	6	UNIT
16	KOMPUTER/ PC	3	UNIT
17	LAPTOP/ NOTEBOOK	4	UNIT
18	WIRELES	1	UNIT
19	MEJA KERJA	23	UNIT
20	KURSI KERJA	29	UNIT
21	SOFA	1	SET
22	TELEVISI	1	SET
23	PRINTER	2	UNIT
24	CAMERA	1	UNIT
25	HANDYCAME	1	UNIT
26	FILLING KABINET	5	UNIT
27	RAK ARSIP	2	UNIT
28	INFOKUS DAN	1	SET

	LAYAR		
29	JARINGAN INTERNET	1	JARINGAN
30	AREA TAMAN LUAR	-	AREA

2.3. KINERJA PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pelayanan berupa urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. Program Utama lima tahun kebelakang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih bergabung dengan Kantor Kesatuan Bangsa, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk mengukur capaian program utama Kantor Kesatuan bangsa dan Politik periode sebelumnya dapat diukur melalui Indikator Kinerja utama yang ditetapkan melalui sasaran yang harus dicapai, pada saat itu oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya semangat kesatuan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan indikator kinerja :
 - Rasa kebersamaan di masyarakat.
 - Rasa Nasionalisme.
 - Berkurangnya konflik antar etnis, daerah dan agama.
2. Meningkatnya peranan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas lainnya dalam kehidupan berdemokrasi di lingkungan masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas.
 - Aktifitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas.
3. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator sebagai berikut :
 - Jumlah Pemilih Tetap (DPT)
 - Jumlah kasus pelanggaran Pemilu/Pemilukada tingkat partisipasi masyarakat.

4. Tumbuhnya jiwa kewiraan masyarakat dalam menegakkan kehormatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan indikator sebagai berikut :

- Sikap patriotisme
- Cinta Tanah Air
- Bela Negara.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan kondisi umum di atas yang merupakan kondisi lingkungan strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, guna Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang salah satunya terbentuk Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kesatuan bangsa, dan politik.
- 2) Adanya sumber daya manusia (SDM)
- 3) Kabupaten Kampar berdekatan dengan Ibukota Propinsi Riau sebagai pusat pemerintahan Propinsi.
- 4) Situasi Kinerja yang harmonis (tim work)
- 5) Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas dan Yayasan)

KELEMAHAN (W):

- 1). Kuantitas dan Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja ;
- 2). Kualitas (mutu) sarana dan prasarana kantor belum maksimal;
- 3). Kurang maksimalnya dana untuk optimalisasi sasaran kegiatan.
- 4). Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Luas wilayah kabupaten Kampar yang sangat luas.
- 2) Jumlah penduduk yang sangat besar.
- 3) Berkembangnya LSM, Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya yang ada di kabupaten Kampar.
- 4) Teknologi informasi yang semakin canggih
- 5) Sudah ada kesamaan visi antar aparat & Lembaga yang menjadi binaan (hubungan kerja)

ANCAMAN (T):

- 1) Iklim Politik yang kurang kondusif
- 2) Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata
- 3) Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat
- 4) Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas dan Yayasan) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan.
- 5) Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat
- 6) Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat diakibatkan oleh fanatisme ke agamaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Permasalahan Sosial

- a. Masyarakat Kabupaten Kampar mayoritas bersuku Melayu dan beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di kabupaten Kampar cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat.
- b. Rendahnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa dimasyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengingat dan menghargai lagi bagaimana perjuangan pendahulu-pendahulu bangsa.
- c. Masih rendahnya kehidupan sosial masyarakat sehingga sering terjadi konflik-konflik sosial dimasyarakat seperti masalah sengketa tanah/lahan, masalah pro dan kontra kepemimpinan Kepala Desa, masalah pengolahan bahan galian C oleh perusahaan, masalah kesenjangan pembangunan disuatu daerah dan lain-lain.

2. Permasalahan Politik

1. Iklim politik yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme.
2. Pemahaman politik yang rendah di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang diakibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

3. Fasilitasi bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlabayang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim, yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat.
4. Permasalahan Tapal Batas Wilayah dengan Kabupaten Rokan Hulu yang belum tuntas, sehingga mengakibatkan terjadinya gejolak dimasyarakat.

3.2. **TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yang akan diwujudkan pada 2017-2022 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera“,

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Kampar untuk mewujudkan visi sebagai berikut :

➤ **Misi Pertama :**

Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Profesional;

➤ **Misi Kedua :**

Mengembangkan Pertanian yang Modern dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;

➤ **Misi Ketiga :**

Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan Proporsional;

➤ **Misi Keempat :**

Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif ;

➤ **Misi Kelima :**

Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolahan yang Maju.

➤ **Misi Keenam :**

Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang Religius, Beradat, dan Berbudaya.

Untuk menunjang visi dan misi tersebut terdapat 4 (empat) program yang dipersiapkan untuk mencapai misi keenam yaitu program :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b) Menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c) Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan wawasan kebangsaan ;
- d) Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- e) Melakukan sosialisasi dan pemahaman dalam Penguatan Nilai-nilai Pancasila ;
- f) Melakukan sosialisasi dan pemahaman dalam pelaksanaan Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan dan Cinta Bangsa ;
- g) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaporan ;
- h) Melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi ;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya ;

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau secara keseluruhan.

Telaahan Renstra Dirjen Kesbangpol dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dengan Renstra Dirjen Kesbangpol sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Visi dan misi Dirjen Kesbangpol adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya persatuan dan kesatuan melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi : 1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Memantapkan sistem politik yang demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memantapkan wasbang, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela Negara serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan Pilsosbud dan hukum segenap negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Dalam implementasi lebih lanjut, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau ini menjadi arahan bagi penetapan dan strategi pembangunan bidang keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan oleh organisasi (SOTK) yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Ketahanan Ideologi Politik, Bidang Kesatuan Bangsa, serta Bidang Hak Azasi Manusia dan Hubungan Antar Lembaga di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam Rencana Strategisnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau memiliki visi, yaitu :

“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Suasana yang Kondusif di Provinsi Riau”.

M i s i

Dalam rangka pencapaian Visi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau menetapkan misi yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Demokrasi
- b. Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif
- c. Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan percepatan pembangunan Provinsi Riau

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 tersebut dapat dijabarkan dalam 6 (enam) prioritas Pembangunan :

1. Prioritas Pembangunan Kehidupan Sosial dan Budaya difokuskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia.
2. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Prioritas Peningkatan Perekonomian
4. Prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Prioritas Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur

6. Prioritas melaksanakan pemerintah yang baik

Sasaran strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 khususnya Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum adalah :

- a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
- b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas Adapun penghambat dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Riau adalah masalah pendanaan dan program kerja, karena kegiatan kerja Kementerian Dalam Negeri Khususnya Dirjen Polpum dan Badan Kesbangpol Prov. Riau ada yang tidak sama (tidak sinkron) diantaranya adalah kegiatan pada Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, ekonomi dan kemasyarakatan, pada bidang tersebut sesuai dengan RPJMD Kab. Kampar kegiatannya lebih difokuskan ke arah penurunan kasus kriminal, pembinaan FKUB dan Ormas, sedangkan kegiatan seni dan peningkatan pengetahuan akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dihapuskan.

Tabel 3.1

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar terhadap Sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten	Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi	Capaian Sasaran Renstra OPD K/L
2	3	4	5
- Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Program Ketahanan Seni,

<p>Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kehadiran Aparatur - Rata-Rata Capaian Kinerja ASN - Nilai AKIP OPD - Jumlah aktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan - Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) - Jumlah kasus Konflik Sosial - Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Program Pendidikan Politik Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional - Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi - Program Fasilitasi Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan 	<p>Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri - Program Ketahanan Ekonomi - Program Kewaspadaan Nasional - Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan - Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol
---	--	---	--

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa-desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b)

kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi: pengembangan kawasan-kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Luasnya wilayah kabupaten Kampar dan merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan ibukota Propinsi Riau maka hal ini menimbulkan peluang ekonomi sekaligus menimbulkan ancaman akan kamtibmas, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi untuk menjaga ketahanan bangsa dan kesatuan bangsa.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dalam merumuskan strategi perlu mempertimbangkan faktor lingkungan yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam menganalisa dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut digunakan analisa SWOT (Strength, weakness, oppurtunities, threats). Adapun isu-isu strategis bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

a. Dampak Reformasi

Era reformasi diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformasi yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomaly remormasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak dipungkiri pula dampak positif dari reformasi yaitu *pertama* mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis dan demokratis, *kedua* tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara dalam hal ini berdirinya parpol-parpol baru, Ormas/LSM dan lembaga-lembaga independen lainnya.

Namun demikian reformasi juga dibarengi dengan dampak negatif yang tak kalah drastisnya yaitu dengan semakin berkurangnya semangat nasionalisme, kebebasan yang kebablasan, lebih mengutamakan kepentingan pribadi/golongan, terjadinya konflik sosial dengan melakukan demo yang anarkis.

Dengan reformasi juga mengakibatkan menjamurnya Ormas/LSM yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Namun sangat disayangkan tanpa adanya kontrol yang jelas serta masih minimnya kualitas SDM sebagian Ormas/LSM, yang akhirnya justru berdampak negatif dan tidak searah dengan cita-cita reformasi.

b. Pergeseran nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Salah satu yang berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat adalah pengaruh globalisasi.

Globalisasi merupakan zaman perkembangan kotemporer yang mempunyai pengaruh dalam mendorong berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang berlangsung saat ini. Pengaruh Globalisasi menyebabkan semakin terbukanya dunia dan saling bergantung satu sama lainnya, yang membawa perspektif baru bagi dunia tanpa tapal batas

dan akan mempengaruhi perkembangan budaya daerah serta akan mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.

Dengan adanya Globalisasi jelaslah muncul pergeseran yang membawa perubahan besar dari semua faktor kehidupan masyarakat. Salah satu faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat itu adalah kemajuan teknologi informasi yang telah membuka cakrawala masyarakat dan percepatan akses informasi dengan segala dampak positif dan negatifnya.

Namun demikian dalam kenyataannya masyarakat kabupaten Kampar yang terdiri dari berbagai macam etnis, agama, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang berbeda, belum siap sepenuhnya menerima dampak kemajuan teknologi tersebut. Sehingga timbul sikap individualistis dan kesenjangan sosial masyarakat, yang membuat masyarakat merasa tidak membutuhkan orang lain lagi dalam aktivitasnya karena telah dimudahkan dengan kemajuan teknologi

c. Sengketa Lahan

Wilayah kabupaten Kampar sebagian besar terdiri dari perkebunan, baik perkebunan yang dikelola oleh perusahaan maupun masyarakat sebagai perkebunan swadaya. Lahan perkebunan ini telah menjadi primadona dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Dalam prosedur pembukaan lahan perkebunan dan perizinan yang dilakukan oleh dunia usaha atau perusahaan sering mengabaikan komitmen/kesepakatan baik dengan pemerintah daerah ataupun masyarakat tempatan, hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa lahan ditengah-tengah masyarakat. Penyebab lainnya sehingga terjadi sengketa lahan adalah tidak adanya kepastian hukum tentang batas-batas wilayah administrasi pemerintahan baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Demikian

juga ketidakpastian wilayah hukum adat yang di atasnya terdapat tanah-tanah adat yaitu tanah ulayat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meminimalisir potensi disintegrasi dalam menopang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi yang dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
4. Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas kelembagaan politik.
5. Meningkatkan kewaspadaan dini dan ketahanan bangsa.
6. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan LSM dalam menunjang pembangunan di daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam

jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar adalah sesuatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar telah merumuskan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya rasa cinta tanah air.
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan.
3. Meningkatnya kerukunan umat beragama
4. Kokohnya Integrasi.
5. Kuatnya Integritas Wilayah.
6. Makin baiknya pemahaman politik masyarakat.
7. Meningkatnya partisipasi politik.
8. Makin berperannya lembaga politik.
9. Meningkatkan citra lembaga politik dimata masyarakat.
10. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat.
11. Kokoh dan kuatnya ketahanan bangsa.
12. Meningkatnya Peran masyarakat dalam pembangunan melalui Ormas dan LSM.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAMPAR TERHADAP RPJMD**MISI VI MEMPERKUAT CITRA KAMPAR SEBAGAI SERAMBI MEKAH YANG RELIGIUS BERADAT DAN BERBUDAYA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	target tahun					Kondisi Kinerja Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
I.5. Meningkatkan Profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur	Aparatur yang memenuhi standar kompetensi jabatan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Meningkanya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VI.1 . Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat	Meningkatnya aktivitas dan ekspresi seni dan budaya lokal	Intensitas Ekspresi seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VI.2 . Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Jumlah aktifitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan	1 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas

	Meningkatkan aktifitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan beragama dan bermasyarakat	Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)	8 konflik	6 konflik	4 konflik	4 konflik	4 konflik	2 konflik	2 konflik
	Meningkatnya peran Islamic Center Kampar sebagai pusat pendidikan dan pengembangan dakwah islam	Jumlah program kegiatan islamic Center perbulan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan	27 Kegiatan
VI.3	Membangun karakter generasi muda yang religius, beradab dan berbudaya	Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikalisme	80 Kasus	70 Kasus	65 Kasus	60 Kasus	55 Kasus	50 Kasus	50 Kasus
	Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda	Jumlah karya kreasi/ inovasi generasi muda	4 Aktifitas	4 Aktifitas	6 Aktifitas	6 Aktifitas	8 Aktifitas	8 Aktifitas	8 Aktifitas

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di atas, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menetapkan Strategi dan Kebijakan.

Adapun Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jiwa nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa diseluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan forum koordinasi lintas agama.
3. Meningkatkan pembinaan Wasasan Kebangsaan.
4. Meningkatkan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat
5. Meningkatkan kedewasaan berpolitik masyarakat.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Perwujudan jiwa nasionalisme dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa diseluruh lapisan masyarakat.
2. Peningkatan forum kordinasi lintas agama.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban.
4. Perwujudan kehidupan politik yang demokratis.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2017-2022, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas Perangkat Daerah, Program/Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2017-2022. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar 2017-2022, sebagai berikut :

Tabel 5.1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAMPAR

MISI VI : MEMPERKUAT CITRA KAMPAR SEBAGAI SERAMBI MEKAH YANG RELIGIUS BERADAT DAN BERBUDAYA

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai karakter dan penciri kehidupan masyarakat	Meningkatnya aktifitas dan ekspresi seni dan budaya lokal	Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreatifitas karya budaya lokal	Peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lokal
2	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani	Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama	Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan
		Meningkatnya aktifitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan atika dalam pembangunan kehidupan beragama serta bermasyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan dan kesadaran kepada masyarakat untuk hidup rukun, toleran, dan gotong royong dalam kebinekaan Penyelenggaraan dialog antar umat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur melalui pembentukan dan pemberdayaan fkub (forum Kerukunan Umat Beragama) di Kabupaten Kampar
3	Membangun Karakter generasi muda yang berakhlak, beradab dan berbudaya	Terjaganya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA pergaulan bebas, dan radikalisme	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, pergaulan bebas, dan radikalisme Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama
		Terbangunnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreatifitas generasi muda	Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya olahraga, budaya prestasi, dan profesionalisme, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	Penyediaan ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan menyalurkan bakat, kreativitas dan aspirasinya Peningkatan penumbuhan jiwa patriotisme pemuda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Kantor Kesbangpol

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2017-2022, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas Perangkat Daerah, Program/Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar tahun 2017-2022. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar 2017-2022, sebagai berikut :

Tabel.3
Rencana Program, Kegiatan, Target dan Indikasi Pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Kampar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Akhir 2022	
							2017		2018		2019		2020		2021		2022		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Lancarnya kegiatan administrasi pada Kantor Kesbangpol Kab. Kampar	Pelayanan Administrasi	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran			532.861.500		535.561.500		589.117.650		648.029.415		712.832.357		784.115.592	
				- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bln	12 bln	900.000	12 bln	900.000	12 bln	990.000	12 bln	1.089.000	12 bln	1.197.900	12 bln	1.317.690	12 bln
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	53.600.000	12 bln	53.600.000	12 bln	58.960.000	12 bln	64.856.000	12 bln	71.341.600	12 bln	78.475.760	12 bln
				- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	12 bln	12 bln	5.100.000	12 bln	5.100.000	12 bln	5.610.000	12 bln	6.171.000	12 bln	6.788.100	12 bln	7.466.910	12 bln
				- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor yang memadai	12 bln	12 bln	26.037.900	12 bln	26.037.900	12 bln	28.641.690	12 bln	31.505.859	12 bln	34.656.445	12 bln	38.122.089	12 bln

				- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja yang baik	12 bln	12 bln	6.200.000	12 bln	6.200.000	12 bln	6.820.000	12 bln	7.502.000	12 bln	8.252.200	12 bln	9.077.420	12 bln
				- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor yang cukup	12 bln	12 bln	35.514.100	12 bln	35.514.100	12 bln	39.065.510	12 bln	42.972.061	12 bln	47.269.267	12 bln	51.996.194	12 bln
				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	27.108.500	12 bln	27.108.500	12 bln	29.819.350	12 bln	32.801.285	12 bln	36.081.414	12 bln	39.689.555	12 bln
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang baik	12 bln	12 bln	4.473.000	12 bln	4.473.000	12 bln	4.920.300	12 bln	5.412.330	12 bln	5.953.563	12 bln	6.548.919	12 bln
				- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya administrasi pada kantor Kesbangpol	12 bln	12 bln	43.053.000	12 bln	43.053.000	12 bln	47.358.300	12 bln	52.094.130	12 bln	57.303.543	12 bln	63.033.897	12 bln
				- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bln	12 bln	7.440.000	12 bln	7.440.000	12 bln	8.184.000	12 bln	9.002.400	12 bln	9.902.640	12 bln	10.892.904	12 bln
				- Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bln	12 bln	7.080.000	12 bln	7.080.000	12 bln	7.788.000	12 bln	8.566.800	12 bln	9.423.480	12 bln	10.365.828	12 bln
				- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bln	12 bln	156.830.000	12 bln	156.830.000	12 bln	172.513.000	12 bln	189.764.300	12 bln	208.740.730	12 bln	229.614.803	12 bln
				- Penyediaan jasa pengamanan kantor	Terjaganya keamanan kantor	2 Org	2 Org	65.700.000	2 Org	65.700.000	2 Org	72.270.000	2 Org	79.497.000	2 Org	87.446.700	2 Org	96.191.370	2 Org
				- Penyediaan tenaga administrasi	Lancarnya pelayanan administrasi	5 Org	5 Org	93.825.000	5 Org	96.525.000	5 Org	106.177.500	5 Org	116.795.250	5 Org	128.474.775	5 Org	141.322.253	5 Org

							- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 exp	10 exp	3.905.000	10 exp	3.905.000	10 exp	4.295.500	10 exp	4.725.050	10 exp	5.197.555	40 exp	5.717.311	40 exp
							- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya buku pelaporan keuangan akhir tahun	10 exp	10 exp	3.905.000	10 exp	3.905.000	10 exp	4.295.500	10 exp	4.725.050	10 exp	5.197.555	40 exp	5.717.311	40 exp
							- Penyusunan RENSTRA SKPD	Tersedianya Renstra SKPD	1 keg	1 keg	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 keg
							- Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya RENJA SKPD	-	-	-	-	-	1 keg	39.310.000	1 keg	43.241.000	1 keg	47.565.100	1 keg	52.321.610	Kesbang pol
Meningkatkan rasa Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.	rasa cinta tanah air	Tingginya rasa cinta tanah air di masyarakat					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	21 ormas	25 org	76.099.750	25 org	76.099.750	351 org/ 87 ormas	1.033.562.125	461 org/ 91 ormas	1.136.918.338	494 org/ 91 ormas	1.250.610.171	839 org/ 99 ormas	1.375.671.188	839 org/ 99 ormas
							- Peningkatan nilai2 luhur budaya bangsa	Jumlah tokoh masyarakat yang memahami akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	-	-	-	-	42 org	169.014.800	84org	185.916.280	84 org	204.507.908	84	224.958.699	Kesbang pol
							- Pelatihan bela negara	Jumlah masyarakat yang memahami tentang keutuhan NKRI	-	-	-	-	-	242 org	346.579.800	242	381.237.780	242	419.361.558	242	461.297.714	Kesbang pol
	Meningkatnya rasa wawasan kebangsaan.	Tumbuh rasa kebangsaan					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar			-	-	-									

						- Pembinaan dan pendidikan politik bagi aparaturnya desa	Jumlah aparaturnya desa yang memahami tentang politik	-	-	-	-	-	42 org	121.040.200	42 org	133.144.220	84 org	146.458.642	126 org	161.104.506	Kesbang pol	
						- Sosialisasi tentang pilpres tahun 2019	Jumlah masyarakat yang memahami tentang pilpres	-	-	-	-	-	1050 Org	380.788.750	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol	
	Meningkatnya partisipasi politik	Tingginya partisipasi politik masyarakat				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik			-	-											
						- Operasional tim koordinasi dukungan kelancaran pemilihan Presiden	Kelancaran pemilihan Presiden th 2019	-	-	-	-	-	21 kec	391.722.400	-	-	-	-	-	-	-	Kesbang pol
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan politik	Makin berperannya lembaga politik	Jumlah lembaga politik.				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik														-	
						- Operasional Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik	Jumlah partai politik yang lengkap administrasinya	11 parpol	11 Parpol	43.407.550	14 partai	43.407.550	18 partai	47.748.305	20 partai	52.523.136	22 partai	57.775.449	22 partai	63.552.994		Kesbang pol
	Meningkatnya citra lembaga politik di mata masyarakat.	Kualitas lembaga politik				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik															
						- Diklat politik bagi anggota parpol	Jumlah anggota parpol yang memahami bidang politik	-	-	-	-	-	22 parpol	203.333.000	22 parpol	223.666.300	22 parpol	246.032.930	22 parpol	270.636.223		Kesbang pol
Meningkatkan kewaspadaan dini dan ketahanan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat.	Kehidupan masyarakat				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																

bangsa		nyaman dan tenteram.					- Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota FKDM	Jumlah anggota FKDM yang mampu mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban sedini mungkin	-	25 Org	76.099.750	25 Org	76.099.750	25 Org	83.709.725	51 org	92.080.698	84 ORG	101.288.767	177 org	111.417.644	Kesbang pol	
	Kokoh dan kuatnya ketahanan bangsa	Masyarakat terlindungi dari gangguan keamanan					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																
							- Peningkatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Lancarnya penanganan Konflik	4 kasus	4 kasus	104.446.700	4 kasus	104.446.700	10 kasus	114.891.370	14 kasus	126.380.507	18 kasus	139.018.558	22 kasus	152.920.413	Kesbang pol	
Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan LSM dalam menunjang pembangunan di daerah	Meningkatnya Peran masyarakat dalam pembangunan melalui Ormas dan LSM	Jumlah ormas dan LSM.					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan															-	
							- Fasilitasi perkembangan ormas dan LSM	Jumlah ormas dan LSM yang dimonitor	6 Ormas/LSM	-	-	-	-	18 ormas/LSM	148.356.600	22 ormas/LSM	163.192.260	26 ormas/LSM	179.511.486	30 ormas/LSM	197.462.635	Kesbang pol	
		Kualitas Ormas dan LSM					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																
							- Pembinaan ormas dan LSM	Jumlah anggota ormas dan LSM yang berkualitas	15 Ormas/LSM	-	-	-	-	69 ormas/LSM	133.446.500	69 ormas/LSM	146.791.150	69 ormas/LSM	161.470.265	69 ormas/LSM	177.617.292	Kesbang pol	
																						-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.1 Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Tujuan RPJMD

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yg konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja

Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAMPAR YANG MENGACU PADA RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2016	Target Tahun ke						Kondisi Akhir 2022
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realisasi Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Realisasi Pemenuhan Terhadap Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Kehadiran Aparatur	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-Rata Capaian Kinerja ASN	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	Nilai AKIP OPD	70%	75%	75%	78%	80%	80%	80%	80%
6	Jumlah aktivitas pemberdayaan umat yang dilaksanakan secara kemitraan antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta lembaga sosial keagamaan	1 Aktifitas	1 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas	2 Aktifitas

7	Jumlah kasus intoleransi terhadap perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	12 konflik	8 konflik	6 konflik	4 konflik	4 konflik	4 konflik	2 Kasus	2 Kasus
8	Jumlah kasus Konflik Sosial	4 Kasus	4 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus
9	Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik	47,33%	58,23%	69,19%	72,47%	70,52%	70,52%	70,52%	70,52%

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 - 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau adalah merupakan komitmen bersama dari seluruh aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang disusun adalah bagian akhir menuju proses pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh setiap Perangkat Daerah dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dengan penyusunan program dan kegiatan yang telah terstruktur diharapkan pada tahun 2022, kinerja pemerintah daerah telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar periode 2017-2022 harus dijadikan acuan bagi lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dapat mencapai apa yang telah ditargetkan pada tahun 2022.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAMPAR



AFRIZAL ABRA, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19620716 199203 1 008